

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang diperoleh dari beberapa macam sumber yang akan dipakai sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan kegiatan penelitian atau membuat karya ilmiah. Dalam hal ini, landasan teori bisa didapati dari berbagai macam media, contohnya jurnal, skripsi, artikel, berita, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa kajian pustaka adalah bagian penting yang ada pada proses sebuah penelitian atau karya tulis yang dipakai bisa melenceng dari topik permasalahan, sehingga hasil dari penelitian menjadi kurang maksimal. Maka dari itu, tanpa adanya kajian pustaka, maka penulis atau bahkan pembaca akan kesulitan dalam memahami garis besar dari proses penelitian yang telah dijalankan sudah tidak sesuai dengan tujuan awal.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah salah satu upaya dalam rangka mencari bandingan dalam suatu penelitian. Kajian penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan serta menunjukkan orsinalitas sebuah penelitian. Kajian penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti untuk mendapatkan inspirasi baru, walaupun lokasi dan masalahnya tidak sama persis tetapi sangat membantu agar bisa menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dan penelitian.

Peneliti telah memilih tiga penelitian terdahulu yang dimana berkaitan dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Linggosari

Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu terkait dengan tema penelitian Peneliti:

1. Anggun Tasya. Skripsi (2023) dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Keluarga Miskin Di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaaten Langkat”.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sendiri hakekatnya untuk membantu masyarakat miskin di kampung ataupun pedesaan, BLT DD sendiri adalah program bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa lalu di kelola oleh pemerintahan desa untuk di salurkan kepada masyarakat miskin di desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Keluarga Miskin Di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabputaen Langkat dapat dikatakan belum efektif karena sebagaai berikut a. keterlambatan pencairan dana sehingga penyaluran dilakukan tiga bulan sekali dan tidak semua masyarakat tergolong miskin yang menerima bantuan tersebut. b. pendataan yang sulit dilakukan karena kondisi wilayah serta prasarana jalan yang terbatas di desa tersebut. c. pemahaman masyarakat yang masih kurang dimana masyarakat tidak datang dalam sosialisasi

yang dilakukan pemerintah Desa Karya Maju terkait dengan bantuan langsung tunai (Tasya, 2021).

Penelitian tentang Efektivitas Program bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah dikemukakan tersebut, ada kesamaan dan perbedaan dari hasil dan kesimpulan yang disampaikan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya adalah mengkaji tentang efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD). Pada penelitian ini sama-sama menjabarkan bagaimana program bantuan langsung tunai dana desa agar efektif dalam ketepatan sasaran dan sosialisasi program. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Anggun Tasya untuk lokus penelitiannya di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

2. Refendy paat, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh. Jurnal penelitian (2020) dengan judul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan”

Program bantuan langsung tunai dana desa hakekatnya adalah membantu masyarakat miskin desa. Program blt dd sendiri dibuat oleh pemerintah dalam bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat miskin/kurangmampu, blt dd sendiri bertujuan untuk membantu kebutuhan keluarga miskin yang telah tercantum pada kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa biasanya kriteria yang sudah ditetapkan tersebut, sudah disepakati melalui musyawarah desa. Di dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi bantuan langsung tunai dana

desa di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Di dalam penelitian ini meneliti apakah ada permasalahan atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode serveui yang digunakan adalah metode wawancara kepada kepala desa beserta beserta dengan apararat desa dan masyarakat indikator yang digunakan adalah indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yang meliputi organisation (organisasi), interpretation (interpretasi), aplication (aplikasi/penerapan). Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam ketepatan waktu pada penyaluran blt dana desa di Desa Tokin Baru, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran blt dana desa sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Dugaan nepotisme dalam penentuan penerima blt dana desa tidak terbukti dilapangan dan peneliti menanggapi hanya kurangnya informasi yang benar kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesalahpahaman saja. Dari segi aspek aplikasi dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur sudah tepat sasaran (Papatungan et al., 2019).

Penelitian tentang impelemntasi bantuan langsung tunai dana desa yang telah dikemukakan tersebut ada kesamaan dan perbedaan dari hasil dan kesimpulan yang disampaikan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaanya adalah mengkaji tentang bantuan langsung tunai dana desa. Padaa penelitian sama sama menjabarkan bagai mana proses dalam menyampaikan bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian. pada penelitian yang di lakukan oleh Sofia Pangemanan, Frans Singkoh. Jurnal penelitian

tersebut menjabarkan mengenai implemntasi bantuan langsung tunai dana desa di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan peneliti menjabarkan mengenai efektivitas program bantuan langsung tunai dana Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Heru Purnawan, dkk. Jurnal penelitian (2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang”

Bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) adalah bantuan sosial yang bersumber dari dana desa dan diberikan kepada masyarakat miskin atau kelompok rentan yang terdampak kondisi tertentu seperti krisis ekonomi, memiliki riwayat penyakit menahun dan lain sebagainya. Bantuan langsung tunai dana desa sendiri bertujuan untuk membeantu keluarga miskin atau kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi dampak ekonomi akibat kondisi darurat atau krisis, meningkatkan daya beli masyarakat desa. Di dalam penelitian ini sendiri bertujuan mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan BLT-DD sebagai solusi ekonomi masyarakat Desa Taba air Pauh. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Dalam penelitian ini masih adanya ditemukan masalah salah satunya, masalah sosial dan proses pelaksanaan masih menjadi hal yang perlu ditelaah, adajuga masalah kurangnya koordinasi antara pelaksana dan minimnya sarana dan prasarana penunjang (Triyanto et al., 2022).

Penelitian tentang implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa ada kesamaan dan perbedaan dari hasil dan kesimpulan yang disampaikan dengan

penelitian yang dilakukan. Persamaanya adalah mengkaji tentang bantuan langsung tunai dana desa seberapa berhasilnya bantuan langsung tunai ini di lingkungan masyarakat kurang mampu dan apakah terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa ini. perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang di lakukan Heru Purnawan dan kawan kawan, menjabarkan mengenai implemntasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang, sedangkan peneliti menjabarkan mengenai efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2. 1Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Permasalahan Dan Perbedaaan			
			Teori yang Dipakai	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Anggun Tasya	Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Keluarga Miskin Di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat	Efektivitas Makmur (2010)	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Data - Reduksi Data - Penyajian Data - Penarikan Kesimpulan

2.	Refendy paat, Sofia Pangemana, Frans Singkoh	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa	Jones, (Wahab 2015: 166)	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Purposive Sampling
		Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan				
3.	Heru Purnawan, Deni Triyanto dan Subhan Ilham Thareq	Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang	Anderson dan Wahab (2012)	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam (Gunawan, 2014)

Sumber: Peneliti, 2025.

2.1.2 Kajian Terhadap Grand Theory

2.1.2.1 Pengertian Administrasi

Administrasi didefinisikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun bisa dijalankan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang bersangkutan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal, yaitu fungsi pengarahan organisasi, fungsi manajemen organisasi dan fungsi pengawasan. Maka dari itu administrasi mempunyai peranan yang sangat krusial dan penting dalam semua aktivitas sebuah organisasi.

Administrasi diartikan dalam arti sempit adalah suatu aktivitas catat mencatat, tulis menulis, dan surat menyurat. Sedangkan dalam arti luas administrasi adalah Kerjasama satu orang atau lebih dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana. Ilmu administrasi terus berkembang, banyak teori para ahli yang mengemukakan konsep ilmu administrasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia (M. Rahman, 2017).

Pengertian Adminitrasi dalam bahasa Indonesia ada 2 (dua): Adminitrasi berasal dari bahsa Belanda, “*Administratie*” yang merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catatmencatat, mengetik, menggandaakan, dan sebagainya). Kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut: Clerical works (FX. Sordjadi, 1989). **Prajudi Atmosudirjo (1980)**, tatusaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian (the handling) informasi. **J. Wajong (1962)**, kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tatusaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan. **Reksohadiprawiro (1984)**, administrasi berarti tatusaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya. Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa pengertian administrasi didalam bahasa Indonesia mempunyai dua arti, salah santunya adalah mengacu pada “*Administratie*” dari bahsa Belanda yang mengacu pada pengertian administrasi dalam arti sempit, adalah sebagai kegiatan tata usaha kantor seperti mencatat, mengetik, dan menggandakan dokumen. Administrasi juga disebut sebagai

pekerjaan pengendalian informasi (handling information) yang mengikutsertakan pencatatan sistematis segala sesuatu dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi seorang pimpinan. Jelasnya pandangan menyeluruh serta hubungan antar fakta .

Prajudi Atmosudirdjo (1982:39-40) menyatakan Administrasi sebagai berikut :

“Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi barangsiapa hendak menegtahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi”.

Administrasi adalah sebuah fenomena sosial yang merupakan wujud aktivitas masyarakat modern dan selalu bersangkutan dengan organisasi. Administrasi hanya dapat ditemukan dalam organisasi yang aktif dan berfungsi, oleh karena itu keberadaan administrasi bergantung pada eksisitensi organisasi tersebut.

Sondang P.Siagian (1985) mengatakan bahwa Administrasi adalah

“keseluruhan porses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umum nya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Dari kesimpulan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah sebuah rangkaian proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang sudah diterangkan sebelumnya. Proses ini melibatkan kerjasama antara dua orang atau lebih yang bekerja secara terorganisir untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini adadministrasi tidak hanya mencakup kegiatan teknis, tetapi juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia,waktu, dan juga alat untuk memastikan keputusan yang telah di angkat dapat dijalankan dengan efektif dan

efisien.

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik adalah semua tindakan yang dijalankan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, yang mencakup : Administrasi sipil, adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh departemen dan non departemen mulai dari kegiatan kelurahan sampai dengan kegiatan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mendalami tentang seperti apa pengelolaan suatu organisasi publik, biarpun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: jikalau manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, kalau administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik atau pemerintah, seperti departemen departemen dan dinas-dinas, bermula dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi: penyusunan, pengimplementasian, dan juga pengevaluasian daerah dan good governance.

Mc Curdy (1986) dalam survey literturnya mengemukakan bahwa:

“Administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain bahwa administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan politik”.

Administrasi publik adalah proses politik dan juga metode pemerintahan yang berfungsi sebagai cara utama dalam menjalankan berbagai tugas negara. Hal ini menjelaskan bahwa administrasi publik melampaui sekedar persoalan politik.

Sedangkan menurut **Harbani Pasolong (2010:8)** mendefinisikan pengertian administrasi publik : “ administrasi publik sebagai upaya kolaboratif individu tau organisasi untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dan secara efisien memenuhi kebutuhan public”.

Sebagaimana dikemukakan Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010:8), administrasi publik adalah multifaset yang menggabungkan pengetahuan teoritis dan aplikasi praktis untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana pemerintah berinteraksi dengan peraturan masyarakat. Tujuannya adalah supaya meningkatkan daya tanggap kebijakan publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Dari beberapa dimensi pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah upaya kerjasama antara individu ataupun organisasi untuk menjalankan tanggung jawab pemerintah secara efisien, supaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Admnisitrase publik menggabungkan teori dan praktik untuk meningkatkan pengertian tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat, dengan demikian kebijakan publik dapat lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat.

2.1.3 Kajian Terhadap *Middle Theory*

2.1.3.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Kebijakan publik melibatkan proses identifikasi isu kebijakan, pengembangan proposal

kebijakan, advokasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan juga evaluasi kebijakan yang akan diselenggarakan. Kebijakan publik juga bisa dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan (Deni, 2023). Menurut Pressman dan Wildavsky, kebijakan public bersifat strategis dan luas, memiliki fungsi sebagai :

- a. Alat untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.
- b. Sarana untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat.
- c. Instrumen untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi.

Kebijakan publik juga bisa berupa aturan yang disetujui untuk mengatur individu, kelompok, dan juga pejabat.

Sejarah singkat kebijakan publik. Sejarah singkat kebijakan publik dapat ditelusuri hingga abad ke-18 SM. Pada waktu itu, kebijakan publik hanya dianggap sebagai kode, bukan undang-undang yang sistematis, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan publik berkembang menjadi alat untuk mendapat tujuan-tujuan masyarakat, sarana untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat dan instrumen supaya memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi. Perkembangan kebijakan publik juga dipengaruhi oleh perubahan makna dan konsep “publik” dan “kebijakan” itu sendiri. Kebijakan publik jadi lebih kompleks dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan juga membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan tersusun supaya memastikan keberhasilan.

Dalam Indonesia, kebijakan publik juga mengalami evolusi seiring dengan perubahan sosial, politik, dan juga ekonomi negara (Rakhman, 2020).

Kebijakan publik di Indonesia terus berkembang dan juga mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Sejarah singkat kebijakan publik menggambarkan perkembangan dan evolusi kebijakan publik dari bentuk kode menjadi alat supaya mencapai tujuan masyarakat, melibatkan berbagai aktoe dan proses, serta memiliki lingkup yang luas dalam berbagai elmen kehidupan masyarakat.

Carl J Federick sebagai mana dikutip **Leo Agustino(2008:7)** mendefinisikan bahwa:

“kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Deskripsi oleh Carl J Federick yang dikutip oleh Leo Agustino(2008:7) menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah serangkaian tindakan atau kegiatan yang dirancang oleh individu, kelompok, atau pemerintah agar menyelesaikan masalah atau juga mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini diebntuk dalam konteks lingkungan tertentu. Kebijakan ini dirancang dalam konteks lingkungan tertentu yang mempengaruhinya, seperti kondisi sosial, politik, dan juga ekonomi. Dalam prosesnya kebijakan menghadapi berbagai rintangan, seperti keterbatasan sumber daya atau konflik kepentingan, tetapi juga memiliki peluang seperti dukungan dari masyarakat atau inovasi (Handoyo, 2010).

Sedangkan menurut **Anderson** (dikutip dari **Leo Agustino, 2016:7)** menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang

aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlihatkan”.

Pengertian kebijakan public menurut Anderson dalam Leo Agustino, 2016:7 menekankan bahwa kebijakan publik adalah suatu tahapan yang melibatkan tindakan atau kegiatan yang disusun dengan tujuan untuk mencapai maksud tertentu. Proses ini dijalankan oleh individu atau kelompok tertentu (aktor) yang terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan ini bermaksud untuk menangani atau menyelesaikan masalah tertentu yang sudah jelas terlihat dan dirasakan oleh Masyarakat (Annas, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian menurut para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah keputusan atau tindakan yang diperoleh oleh pemerintah ataupun Lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur, mengarahkan, atau mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu.

2.1.3.1 Konsep Kebijakan Publik

Konsep pelaksanaan kebijakan di Indonesia berlandaskan good governance. Untuk mencapai good governance tersebut perlu diketahui dimensi pencapaian yaitu (Hardiansyah, 2018):

- 1) Konsistensi. Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila pelaksanaannya dijalankan secara konsisten yang sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku.
- 2) Transparansi. Transparansi adalah jika terdapat kebebasan akses yang bisa dilakukan oleh public atau kelompok yang mempunyai kepentingan.

Transparansi informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, mudah dimengerti, dan tersedia secara memadai.

Akuntabilitas. Pelaksanaan sebuah kebijakan harus bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

- 3) Keadilan. Keadilan dalam melaksanakan kebijakan publik dapat berupa tidak membedakan pelayanan terhadap golongan tertentu (tidak bersifat diskriminatif).
- 4) Partisipatif. Partisipatif yang berarti bahwa masyarakat berperan dalam keterlibatannya pada pelaksanaan kebijakan. Selain itu sebagai penadah pelaksanaan kebijakan, masyarakat juga berperan sebagai sarana untuk evaluasi dan pengontrolan terhadap wewenang pelaksanaan kebijakan.
- 5) Efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan ketercapaian hasil kebijakan berdasarkan tindakan dan aspek rasionalitas tindakan yang bersangkutan dengan layanan atau produk. Sebuah pelaksanaan kebijakan dikatakan efektif apabila tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 6) Efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan kuantitas pemaksimalan sumber daya seperti pencapaian tujuan, penggunaan manusia, biaya, waktu dan peralatan lainnya. Efisiensi akan berdampak kepada efektivitas pelaksanaan kebijakan.

2.1.4 Kajian Terhadap Operasional Theory

2.1.4.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan suatu program atau organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Perihal ini ditinjau dari sisi input, proses, dan output. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan tepat. Kamus ilmiah populer mengartikan efektivitas sebagai keakuratan penggunaan, hasil guna atau mendukung tujuan (Priyanto & Sudrartono, 2021). Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak (Rachman & Kartika, 2020). Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan.

Siagian (2001:24) menjelaskan bahwa :

“efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijajnkanya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika

hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Berdasarkan uraian diatas efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan ataupun proses dalam menggapai tujuan yang telah diputuskan sebelumnya. Konsep ini melibatkan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan juga prasarana yang direncanakan secara sadar supaya menghasilkan barang atau jasa sesuai target. Efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang telah dicapai mendekati atau memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Semakin sesuai hasil dengan sasaran yang di rencanakan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas tersebut.

Sedangkan menurut **(Susanto, 2009:56)** menyampaikan :

“Bila diteliti lebih mendalam bahwa teori efektivitas kebanyakan diadopsi dari teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbedanya, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi melekat pada kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan”.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa efektivitas dapat disimpulkan sudah sejauh mana suatu tujuan dapat digapai dengan tepat. Sedangkan efisiensi adalah suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan (biaya) dan hasil yang didapatkan (Biologi & Ahmad, 2021). Walaupun sering dianggap berkaitan keduanya berbeda. Efektivitas lebih condong dan berfokus ke pada keberhasilan mencapai tujuan, sedangkan efisiensi menitik beratkan pada penggunaan sumber daya secara optimal.

Menurut **James L.Gibson** Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan efektivitas (dalam buku **Herbani Pasolong, 2010:4**). Menjelaskan :

“berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarnya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya”. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa efektivitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan sejauh mana suatu organisasi berhasil menggapai tujuan yang telah ditentukan. Ini mengukur pencapaian dari hasil aktivitas yang sudah dijalankan, dengan membandingkannya dengan target atau sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain efektivitas memandang keberhasilan suatu organisasi dalam menggapai tujuannya, tanpa terlalu memperhatikan proses atau usaha yang dilakukan selama penggapaian tersebut. Semakin tinggi organisasi dalam menggapai tujuannya sesuai dengan rencana yang telah disusun (Priyatna et al., 2022). Dari hasil beberapa pendapat menurut para ahli diatas dapat disimpulkan

bahwa efektivitas menuju pada sejauh mana suatu kegiatan, proses, atau tindakan berhasil dalam menggapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Efektivitas lebih fokus terhadap pencapaian hasil yang tepat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, tanpa terlalu melihat pada cara atau sumber daya yang dipakai. Dengan kata lain, sesuatu dianggap efektif jikalau tujuan yang menjadi sasaran dapat tercapai dengan sukses, meskipun cara atau sumber daya yang dipakai bisa bervariasi.

2.1.4.2 Program

Gambaran umum program merupakan kumpulan instruksi, rencana kegiatan, pedoman, cara maupun daftar yang berurutan. Program yang hasilnya memiliki beragam pengertian dari berbagai aspek mana istilah tersebut digunakan. Apabila mengacu pada KBBI, terdapat definisi yang tertera yaitu, program sebagai

salah perencanaan dari asas dan usaha, Pemakaiannya bisa dalam bidang perekonomian, ketatanegaraan, dan juga masih banyak lagi (Wibawani et al., 2021). Program juga merupakan perancangan yang disusun oleh individu tau kelompok supaya tercapai prinsip yang sudah ditetapkan sebelumnya. Program bisa diinisiasi berlandaskan kebijakan yang sudah dirumuskan, sesudah itu diimplementasikan kedalam bentuk program tertentu.

Kata “program” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “Prorame” yang mempunyai arti rencana atau acara. Dalam konteks konseptual, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, “program” dimaknakan sebagai suatu rancangan yang melibatkan asas dan sebuah usaha yang akan dijalankan oleh individu atau kelompok tertentu (Arumdani et al., 2021).

Menurut **Hans Hochholzer dalam E Hetzer (2012: 11)**, menjelaskan :

“program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu hal atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai. susunan perencanaan program-program tersebut disebut sebagai program kerja”.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa program merupakan kumpulan aktivitas nyata yang disusun secara sistematis dan terpadu supaya mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan program biasanya melibatkan instansi pemerintah yang bisa bekerja sama bersama pihak swasta dan masyarakat agar memastikan keberhasilan tujuan yang ingin digapai. Program dirancang berdasarkan tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap kegiatan yang disusun dalam sebuah program memiliki tujuan yang jelas. Program juga mencakup sarana atau sumber

daya yang dibutuhkan supaya mendukung pencapaian tujuan tersebut, secara keseluruhan rancangan perencanaan dari berbagai program ini dikatakan sebagai program kerja (Akbar & Rakhmayudhi, 2022), yang bermakna sebagai panduan operasional untuk merealisasikan target dan tujuan yang diinginkan.

Santosa dalam Soesanto (2011:7) menerangkan bahwa :

“program kerja adalah suatu system rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi”.

Dari pemahaman diatas program kerja adalah sistem strategi kegiatan yang dirancang oleh sebuah organisasi dengan maskdu untuk mengarahkan, menggabungkan, dan mengorganisasikan semua aktivitas secara sistematis. Rencana ini di buat untuk jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan, program kerja menjadi pedoman utama bagi organisasi dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari sehingga aktivitas yang dijalankan tetap konsisten dengan visi misi dan tujuan organisasi (Najidah & Lestari, 2019).

Menurut **Farida Yusuf Tayibnabis (2000:9)** mengartikan:

“program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dengan demikian dapat program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaanya berlangsung dengan proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang”.

Menurut penjelasan diatas bahwa program merupakan sebuah upaya tesusun yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan maksud supaya tercapai hasil atau dampak tertentu. Program meliputi serangkaian aktivitas yang

tersusun dengan hati-hati supaya mencapai tujuan tertentu, proses pelaksanaannya bersifat berkesinambungan sehingga hasil yang diinginkan tercapai. Program biasanya terjadi dalam kerangka organisasi baik formal maupun informal yang memberikan struktur dan sumber daya guna mendukung pelaksanaannya. Berdasarkan teori para ahli diatas, maka pengertian program merupakan produk dari sebuah perencanaan yang berdasarkan data yang valid dan mencukupi. Ini melibatkan serangkaian kegiatan yang disusun supaya tercapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan program. Perumusan program adalah perincian dari rencana besar, yang mencakup berbagai macam kegiatan yang disusun supaya tercapai tujuan pembangunan nasional. Program ini menyantumkan elemen-elemen seperti jenis kegiatan, pelaksana, lokasi, jadwal, sumberdaya yang dipakai, dan tolak ukur untuk mengevaluasi hasil. Keseluruhan, program kerja berfungsi sebagai panduan bagi manajemen dalam mengarahkan kegiatan dan memastikan bahwa setiap langkah yang dipilih sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Dengan adanya program kerja yang terstruktur, organisasi bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggapai hasil yang diinginkan.

2.1.4.3 Konsep Efektivitas Program

Efektivitas program adalah sebuah cara untuk menilai sejauh mana suatu program berlangsung, untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan sebelumnya. Makmur (2025 : 6) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya memperlihatkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang telah dicapai, dimana dijalankan dengan ketepatan harapan, implemesntasi, dan hasil yang sudah dicapai. Tetapi efektivitas program

merupakan tingkat perwujudan dari perumusan tujuan yang ditentukan oleh suatu kelompok bahwa didalamnya terdapat tugas-tugas pokok (Siregar et al., 2023).

Siagian (2025 : 34) turut mengemukakan faktor yang mempengaruhi efektivitas program sebagai berikut:

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program antara lain :

1. Keterjelasan tujuan
2. Keterjelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti beranggapan bahwa efektivitas program memiliki beberapa faktor seperti keterjelasan tujuan, keterjelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap, perencanaan, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan system pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Efektivitas program akan tercapai apabila unsur-unsur tersebut dapat diperhatikan.

Dijten Binlantas Depnaker, 1993, dalam (Setiawan 1998) menjelaskan :

“Efektivitas program adalah suatu penialain terhadap tingkat kesesuaian program yang merupakan salah satu cara dalam upaya untuk mengukur sebuah efektivitas padaa suatu program. Efektivitas pada sebuah program ini dapat diketahui yaitu dengan membandingkan tujuan program dengan output dari program”

Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan bahwa efektivitas program merupakan penilaian kepada sejauh mana tujuan program tujuan program tercapai dengan membandingkan hasil atau output program dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Jikalau hasilnya sesuai dengan tujuan program tersebut dianggap efektif tetapi jika tidak program tersebut dinilai kurang efektif, penilaian ini sangat penting untuk mengukur keberhasilan program dalam memenuhi targetnya.

2.1.4.4 Indikator Efektivitas Program

Menurut Cambel J.P. (1989 : 121) mengukur efektivitas secara umum adalah. Keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan uotpu, dan pencapaian tujuan meneyluruh. Supaya efektivitas program berdasasarkan dengan kemampuan oprassional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan maksud tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komperhensif, efektivitas bisa dimaknakan sebagai tingkat kemampuan sebuah lembagaa atau organisasi untuk dapat menjalankan semua tugas-tugas intinya atau untuk mencapai sebuah sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Budiani (dalam Pertiwi dan Nurcahyanto 2017:3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan variable-variabel berikut :

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa efektivitas program bisa diukur melalui beberapa variable. Ketepatan sasaran program memperlihatkan sejauh mana program menggapai kelompok yang dituju. Sosialisasi program mencakup penyampaian informasi yang detail kepada masyarakat, khususnya kelompok sasaran. Tujuan program menilai kejelasan dan pencapaian target yang telah disusun, pemantauan pparogram memastikan program berjalan sesuai rencana melewati evaluasi dan mengawasi berkala (Krisjuyani, 2024).

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa suatu program bisa dikatakan efektif jika dilihat berdasarkan strategi dan pelaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap masyarakat dengan waktu yang sudah di tetapkan. Kemudian terhadap penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas menurut **Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017;3)** karena penenliti ingin mengetahui Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin melalui ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program.

2.1.4.5 Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) merupakan bentuk bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai dari dana desa, secara khusus diperuntukan kepada keluarga miskin atau kurang mampu yang tinggal di desa dan belum mendapatkan dukungan dari program lain. Program (BLT DD) sendiri adalah program yang di buat oleh pemerintah pusat, yang kewenangannya di serahkan kepada desa untuk membantu masyarakat miskin di desa (Iman et al., 2024). Tujuan dari bantuan langsung tunai dana desa sendiri adalah untuk membantu masyarakat miskin atau kurang mampu selain itu bertujuan juga untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga meringkankan perekonomian keluarga yang dirasa miskin atau kurang mampu (Kurnianto, 2018).

Kriteria penerima BLT DD desa linggosari yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstream
2. Punya sakit kronis/menahun
3. Keluarga dengan anggota rumah tangga lanjut usia
4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel

Dari kriteria penerima bantuan langsung tunai di desa linggosari, data diatas disepakati melewati forum musyawarah desa (mudes). Musyawarah desa di desa linggosari sendiri diadakan setiap setahun sekali dan membahas banyak hal salah satunya, terkait dengan Program BLT DD ini.

2.2 Kerangka Berfikir

McGaghie dalam Hayati (2020), kerangka pemikiran adalah proses melakukan pengaturan dalam melakukan penyajian pertanyaan dalam penelitian dan mendorong penyelidikan atas permasalahan yang menyajikan permasalahan dan konteks penyebab peneliti melaksanakan studi tersebut. Pada kerangka berpikir ini diharapkan bisa mempermudah pembaca supaya memahami alur fikiran peneliti. Efektivitas pada sebuah program menjadi salah satu topik yang sangat menarik untuk diteliti, karena bagaimana diketahui pada saat ini banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan berbagai kebijakan lalu di implementasikan kedalam bentuk sebuah program akan tetapi belum tentu berjalan dengan efektif.

Suriasumantri dalam Sugiyono (2017:60) menerangkan bahwa : “Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan”

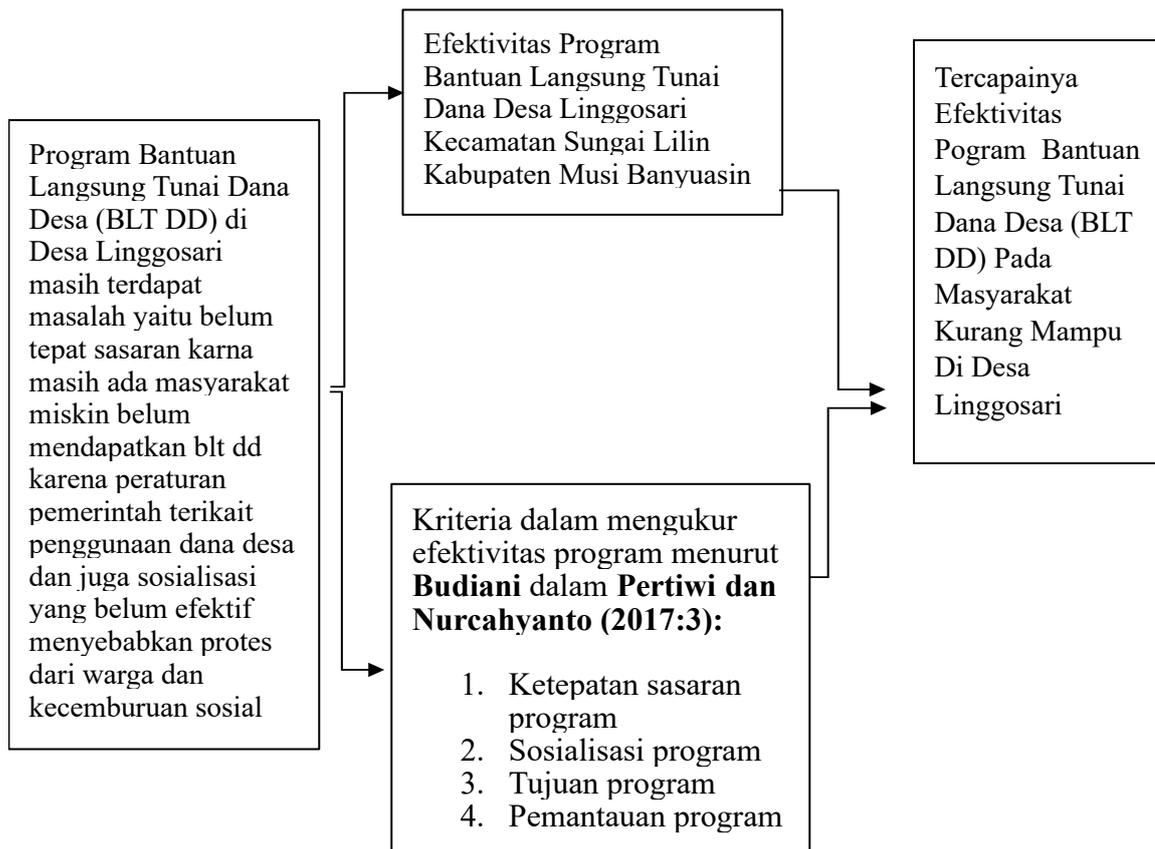
Deskripsi mengenai kerangka untuk mengetahui bagaimana efektivitas program BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) di Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Efektivitas disini menjadi tolak ukur sejauh mana program tersebut berjalan dengan efektif. Maka dari itu Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017) menyatakan bahwa untuk mengetahui efektivitas bisa dilakukan dengan memakai 4 (empat) karakteristik sebagai berikut :

1. **Ketepatan sasaran program**, ketepatan sasaran merujuk pada sejauh mana suatu program berhasil mencapai kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan manfaatnya. Sebuah program dibuat harus berdasarkan

kebutuhan masyarakat, dikatakan tepat sasaran jika program dan kebutuhan masyarakat sebanding.

2. **Sosialisasi program**, sosialisasi program sendiri merupakan proses penyampaian sebuah informasi tentang suatu program terhadap pihak-pihak yang bersangkutan atau terdampak, dengan tujuan supaya meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat.
3. **Tujuan program**, mengenai dengan sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. **Pemantauan program**, pemantauan program merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan juga menilai data secara berkala supaya memastikan bahwa suatu program tersebut sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Supaya kerangka berfikir diatas bisa lebih jelas dan lebih mudah dimengerti, peneliti mencoba menggambarkan kerangka berpikir kedalam gambar dibawah ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber:Diolah oleh peneliti (2025)

2.3 Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka proposisi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Analisis pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) perlu diketahui dan penting perannya dalam meningkatkan program tersebut terhadap masyarakat.

2. Faktor -faktor yang dapat menghambat pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada masyarakat dapat teridentifikasi.